

UWM UKIR SEJARAH

Luluskan Magister Hukum Keistimewaan DIY

YOGYA (KR) - Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta kembali menghadirkan Bregada Kraton Yogyakarta dalam prosesi Wisuda Periode ke-64, Sabtu (24/2) hari ini. Hal ini menandakan kebangkitan tradisi dan budaya Yogyakarta yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19. "Sebagai kampus berbasis budaya, UWM selalu mengedepankan nilai-nilai luhur Yogyakarta dalam setiap kegiatannya. Penggunaan Bregada Kraton Yogyakarta dalam wisuda merupakan simbolisasi komitmen UWM untuk melestarikan budaya dan tradisi Yogyakarta, sekaligus memberikan pengalaman istimewa bagi para wisudawan," kata Rektor UWM Prof Dr H Edy Suandi Hamid MEd, Jumat (23/2).

Edy Suandi Hamid menjelaskan, UWM merayakan tonggak sejarah baru dalam Rapat Senat Terbuka Wisuda Sarjana ke-64 dan Pascasarjana ke-1. Tidak seperti wisuda-wisuda sebelumnya, momentum

kali ini dipenuhi keistimewaan dengan telah diwisudanya para wisudawan dan wisudawati jenjang S2 Program Pascasarjana, khususnya konsentrasi Magister Hukum Keistimewaan DIY, yang menjadi satu-satunya konsentrasi Magister Hukum di Indonesia yang menghadirkan keunikan dengan fokus pada kajian keistimewaan dan budaya DIY.

Apresiasi tinggi pun disampaikan Perwakilan Yayasan Mataram Yogyakarta Dr Inge Gunawan MSI CMA. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIkti) Wilayah V DIY Prof Dr Setyabudi Indartono MM PhD bersama Anggota Parampara Praja Pemda DIY memberikan penghargaan kepada para wisudawan.

Dalam wisuda kali ini, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi diraih Ari Sonar dari Prodi Administrasi Publik dengan IPK 3,92 untuk jenjang S1, dan Vicki Dwi Purnomo dari Prodi Magister Hukum de-

ngan IPK 3,98 untuk jenjang S2. Wisuda diikuti 269 lulusan S1 dan 8 lulusan S2. Mereka terdiri 16 lulusan Program Studi (Prodi) Akuntansi, 10 dari Prodi Manajemen, 2 dari Prodi Kewirausahaan, 172 dari Prodi Hukum, 31 dari Prodi Administrasi Publik, 6 dari Prodi Sosiologi, 3 dari Prodi Ilmu Komunikasi, 13 dari Prodi Arsitektur, 8 dari Prodi Teknik Industri, 8 dari Prodi Teknologi Pangan dan Prodi Magister Hukum 8 orang. Dari 277 lulusan, 96 atau 34,65 persen di antaranya meraih predikat Cumlaude. Dengan wisuda kali ini, jumlah lulusan UWM berjumlah 9.756 orang.

Edu Suandi Hamid menekankan, di tengah surplus bonus demografi bangsa Indonesia yang mencapai hampir 60 persen, UWM bertekad untuk bersinergi dalam membentuk lulusan yang tidak hanya berinovasi, kreatif, dan adaptif, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap perkembangan globalisasi. (*)-f

Menyusuri

Dijelaskan Dian, Kotagede merupakan kawasan yang memiliki nilai historis luar biasa sebagai cikal bakal Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta, sehingga di wilayah tersebut memiliki banyak cagar budaya unggulan. Seperti Masjid Gedhe Mataram Kotagede, Makam Hasta Rengga, Benteng Baluwarti, Watu Gilang, Cepuri dan lainnya.

Selain itu, akan menyusuri tata kota di Kotagede yang masih tersisa dengan kawasan permukiman Jawa, dimana

52 Kg

Polda Jateng berhasil mengungkap pengiriman 52,08 kg sabu dan 35.000 pil ekstasi dari Bandar Lampung menggunakan truk box di jalan tol Cikande Serang Banten. Barang haram itu tersimpan di dalam tiga koper besar dan disembunyikan diantara tumpukan kardus berisi minuman ringan teh. "Kemudian, dua orang PR dan GDA yang membawa truk box B 9606 UCP yang disamarkan sebagai angkutan jasa pengiriman barang digelandang ke Semarang," kata Kapolda.

Produksi

Rachmat menegaskan, ketersediaan beras dapat terjaga dan kini mulai memasuki musim panen padi. Prediksi Maret akan menghasilkan beras sekitar 3,51 juta ton. Kementan juga menyebut, sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah panen padi guna mendukung pemenuhan stok pangan di pasaran.

Sementara itu Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta

Hukum

keberpihakan presiden dan aparat pemerintah dalam kampanye. Apakah ini fenomena euphoria reformasi di Indonesia atau apa?

Perlu digarisbawahi bahwa peristiwa semacam ini (ingin selalu mempertahankan kekuasaan) bukan terjadi di Indonesia saja, melainkan merupakan gejala universal. Robert Mitchel (1919) dalam bukunya yang sangat terkenal mengenai Oligarki mengungkapkan bahwa gejala bercokolnya segelintir orang (oligarki) yang menguasai dan mempertahankan puncak kekuasaan merupakan sesuatu yang lumrah. Dalam setiap organisasi (negara, atau organisasi apapun) selalu terjadi kecenderungan aristokratik, yaitu adanya sekelompok minoritas (pengurus) mengatorkelompok mayoritas (anggota organisasi). Kalau suatu organisasi anggotanya berjumlah 30 orang misalnya, jumlah pengurusnya biasanya cuma lima orang saja (sedikit), tidak mungkin jumlah pengurus lebih banyak daripada anggotanya. Karena pengurus memiliki hak istimewa (yang biasanya menguntungkan) daripada anggotanya.

masih banyak bangunan joglo dan limasan. Kemudian ada makanan tradisional khas Kotagede yang cukup terkenal yaitu kipo, seni tradisi dan organisasi kemasyarakatannya. Kotagede juga terkenal sebagai sentra kerajinan perak. "Inilah potensi-potensi yang akan dieksplor yang dikemas dalam tematik-tematik rute," katanya.

Tahun 2024 ini, Dinas Kebudayaan DIY menyiapkan 17 trip JHC yang akan berlangsung Februari hingga September.

Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir menambahkan, jaringan peredaran narkoba terkait gembong Fredy Pratama seperti biasa menerapkan sistem sel. Di antara pengedar tidak saling mengenal, apalagi kepada otaknya. Namun, berkat kerja keras dan keuletan anggota jaringan peredaran narkoba dari Lampung itu berhasil terungkap. "Sabu dan ekstasi dari Lampung akan kirim ke beberapa daerah seperti Tangerang dan Surabaya,"

Timur, memastikan persediaan atau stok beras di pasar tersebut masih aman hingga menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Ketua Koperasi PIBC Zulkifli Rasyid mengatakan, stok beras masih terpantau aman, bahkan, persediaannya mencapai 1,3 juta ton.

"Saat ini stok beras Bulog masih tersedia. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir sampai Lebaran. Bulog dan

Masyarakat yang tertarik mengikuti Program JHC bisa melakukan pemesanan secara gratis melalui website jogja-heritage.com. Fasilitas yang diberikan seperti sepeda, panduan, voucher belanja makanan tradisional. "Voucher ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan dan situs cagar budaya, sekaligus menjadi pemicu, penggerak sektor UMKM khususnya yang ada di cagar budaya Kotagede," pungkasnya. (Dev/Feb)-f

Sementara tersangka GDA mengaku sudah tiga kali mengirim barang haram itu dan yang keempat kalinya tertangkap. Sedang rekannya, PR mengaku baru pertama dan tertangkap. "Saya ikut GDA karena tergiur dijanjikan uang Rp 200 juta," akunya. Para tersangka dijerat Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) jo pasal 112 ayat (2) dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. (Cry)-f

Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah mengatakan ke kami, sampai detik ini masih tersedia 1,3 juta ton untuk sel-Indonesia," katanya. Persediaan beras dari Perum Bulog itu adalah jenis medium Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) yang dijual dengan Rp 10.900/kilogram, sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Pemerintah. (Ant/San)-d

Pertama, kita semua harus ngabarkan kepada semua orang bahwa Hukum Besi Oligarki ini merupakan godaan *latent* bagi setiap penguasa. **Kedua**, batasi masa jabatan penguasa melalui berbagai perundangan. **Ketiga**, termasuk salah satu model pembatasannya adalah dengan mekanisme pemilihan umum yang periodik, yang jelas sela waktunya. **Keempat**, di negara modern yang demokratis, partai politik harus menjadi bagian penting dalam menyiapkan kepemimpinan nasional yang konstruktif dan berkualitas. Pendidikan politik harus menjadi bagian kegiatan sehari-hari yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Kalau semua upaya itu sudah dijalankan tetapi masih saja terjadi kekonyolan mempertahankan kekuasaan yang menyimpang dari konstitusi, dengan heran kalang parlemen jalanan serta merta merajalela. Tanpa ada yang bisa mengendalikannya. Semoga tidak!

(Penulis adalah Guru Besar (Emiritus) Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)-d

BRI LIGA 1 2023/2024

Dua Laga Berakhir Imbang

TANGERANG (KR) - Dua laga lanjutan pekan ke-25 BRI Liga 1 2023/2024, Jumat (23/2) sore berakhir imbang. Persita Tangerang ditahan Persebaya Surabaya dengan skor 1-1 dan PSIS Semarang bermain imbang 1-1 lawan tamunya, Dewa United.

Di Indomilk Arena Tangerang, Persebaya sempat unggul lewat gol Paulo Henrique menit 38, namun dianulir wasit karena lebih dahulu dalam posisi *offside*. Di akhir babak pertama, Persita justru mencuri gol setelah Henrique membuat gol bunuh diri saat mencoba mengantisipasi tendangan bebas lawan.

Babak kedua, Persebaya tampil menekan. Persita beberapa kali mencoba menggandakan keunggulan melalui skema serangan

balik. Akhirnya, Persebaya menyamakan skor menjadi 1-1 menit 76. Henrique mencetak gol setelah mengonversi umpan matang Kasim Botan. Skor 1-1 tak berubah hingga laga usai.

Pada laga lainnya, PSIS ditahan Dewa United 1-1 di Stadion Madya Magelang. PSIS unggul berkat gol Gali Freitas di menit 16. PSIS mampu menahan gempuran, namun kemenangan di depan mata PSIS buyar. Sonny Stevens, penjaga gawang Dewa United menyamakan skor dengan tandukan.

Koleksi 43 poin, PSIS terancam di posisi dua besar klasemen sementara. Sedang Dewa United mengoleksi 43 poin. Persebaya mengoleksi 31 poin, sementara Persita masih di posisi 15 klasemen dengan 27 poin. (Yud)-d

Enam

Jogja-Solo-Semarang (Joglosemar). "Jalan Tol Yogyakarta-Bawen serta Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo merupakan bagian dari Jaringan Jalan Joglosemar," katanya.

Menurut Subakti, dengan dibangunnya jalan tol di jaringan Joglosemar diharapkan bisa mendorong perekonomian masyarakat sekitar. Selain juga mendorong investasi di sektor pariwisata di daerah tersebut. "Diharapkan dengan tersambungnyajaringan jalan ini dapat menghubungkan berbagai destinasi pariwisata di sekitar wilayah Jogja - Solo - Semarang hingga memperlancar arus distribusi barang dan jasa di Pulau Jawa," ujarnya.

PT Jasa Marga juga berkomitmen untuk terus memastikan pelaksanaan proyek tol Yogyakarta - Bawen, serta tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo dapat ber-

jalan baik sesuai target. Serta memastikan kualitas dan kelayakan bisnis yang mengedepankan aspek Good Corporate Governance (GCG).

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, PSN yang sudah dibangun oleh Pemerintah bersama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menunjukkan progres yang signifikan, serta memberikan manfaat besar bagi perekonomian nasional.

"Pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan tol ini memiliki efek domino terhadap perekonomian regional, baik untuk memperlancar distribusi barang maupun jasa. Dengan adanya proyek ini pun diharapkan dapat menstimulasi aktivitas ekonomi, mendorong investasi, dan membuka peluang kerja," kata Aria. (Ant/Has)-f

Hari

TPS 29 Tegaltirto Berbah (surat suara DPRD Provinsi), TPS 1 Tirtomartani Kalasan (surat suara presiden dan wakil presiden), TPS 2 Tirtomartani Kalasan (surat suara presiden dan wakil presiden), TPS 26 Sidoarum Godean (surat suara DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten), TPS 18 Sidoarum Godean (surat suara presiden dan wakil presiden).

Sementara di Kapanewon Sleman, PSU akan diadakan di TPS 26 Tridadi (surat suara presiden dan wakil presiden). Kapanewon Depok meliputi TPS 126 Caturtunggal (surat suara presiden dan wakil presiden), TPS 125 Condongcatur (surat suara presiden dan wakil presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten).

"Kalau untuk Kota Yogya, PSU akan digelar di 2 TPS lokasi khusus yakni TPS 901 dan TPS 902 Lembaga Pemasarakatan Wirogunan," terangnya.

Sementara untuk PSL digelar di 5 TPS yang semuanya berlokasi di Sleman. Meliputi TPS 1 Tirtomartani Kalasan (surat suara DPRD Kabupaten), TPS 16 Tirtomartani Kalasan (surat suara DPRD RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten), TPS 29 Tirtomartani Kalasan (surat suara DPRD Kabupaten), TPS 32 Tirtomartani Kalasan (surat suara DPRD Provinsi) dan TPS 125 Condongcatur (surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten).

"Karena kondisinya tiap kota/ kabupaten berbeda (peluangannya) jadi cukup bervariasi. Meski begitu yang terbanyak ialah untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Dimana untuk beberapa kasus kami temukan hasil pengawasan di Bawaslu ada pemilih yang dia tidak urus formulir model A5 atau formulir model A Surat Pindah Memilih dan dia terdaftar di DPT asal tapi dia cablos di TPS tersebut," tambah Umi. (Ria)-d

Tersisa

Menurut H Aidi Johansyah SAG MM, karena terbatasnya kuota, maka tidak semua jemaah haji lansia bisa berangkat tahun ini. Sesuai ketentuan, batas usia terendah untuk kategori lansia, 65 tahun. "Karena terbatas kuotanya, yang dapat berangkat tahun ini kita ranking, dari urutan paling tua. Sehingga tertua usia 98 tahun dan termuda 85 tahun," jelasnya.

Sementara di Jakarta, Juru Bicara (Jubir) Kementerian Agama Anna Hasbie mengatakan, progres pelunasan Bipih tahap I sudah mencapai 94,03 persen. "Pelunasan Bipih jemaah haji reguler tahap I ditutup sore ini. Total sudah ada 200.601 jemaah yang melunasi biaya haji," terangnya, Jumat (23/2).

Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota sehingga jumlahnya menjadi 241.000 je-

maah. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. "Jemaah haji reguler yang sudah melunasi terdiri atas 161.567 orang yang memang berhak lunas biaya haji tahun ini, 4.500 jemaah yang masuk kuota lanjut usia



Prakiraan Cuaca Sabtu, 24 Februari 2024						
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelambaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95



Zahrotus Sa'adah, SIKom, MA
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

BEBERAPA hari ini, dunia maya, terutama X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, dihebohkan oleh munculnya hashtag #JanganJadiDosen. Hashtag ini menjadi saluran bagi para dosen di Indonesia untuk menyampaikan keluhan

Tuntutan #JanganJadiDosen Biasa

terkait beban kerja yang dianggap tidak sebanding dengan gaji yang mereka terima. Lebih dari sekadar keluhan finansial, pergerakan ini juga merupakan dampak dari dinamika politik yang semakin memanas setelah Pilpres 2024.

Sebelumnya, kelompok akademisi, yang dikenal sebagai pilar intelektual masyarakat, menjadi sasaran ejekan dengan julukan "si paling intelektual." Hal ini dipicu karena aksi beberapa guru besar atau akademisi dari berbagai kampus yang secara terang-terangan menyuarakan sikap kritisnya terhadap situasi politik di Indonesia, yang kemudian mendapatkan

respons negatif dari sebagian masyarakat. Dalam konteks ini, timbul pertanyaan mengenai alasan akademisi bersikap pasif di tahun-tahun sebelumnya.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, para dosen memberikan penjelasan yang mencakup kompleksitas administrasi kerja, tekanan untuk mencapai angka kredit demi kenaikan jabatan fungsional, serta beban penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mereka menegaskan bahwa keterlibatan dalam hal-hal semacam ini terkendala oleh beban kerja yang memakan waktu dan tenaga. Oleh karena itu, munculnya hashtag

#JanganJadiDosen dapat dipandang sebagai pelampiasan atas keluhan-keluhan yang selama ini terpendam.

Tetapi, seiring dengan itu, muncul pula argumen bahwa netralitas menjadi kendala bagi sebagian dosen untuk bersuara. Mereka khawatir bahwa keterlibatan dalam aksi protes ini dapat diartikan sebagai dukungan politik pada pasangan calon presiden tertentu, yang berpotensi merusak kredibilitas mereka. Sehingga, banyak dosen yang memilih untuk tetap pasif dan hanya fokus pada pemenuhan Beban Kinerja Dosen (BKD).

Kondisi ini menandakan perlunya evaluasi terhadap

sistem administrasi kerja dosen. Administrasi yang rumit dan memakan waktu perlu direformasi agar dosen dapat lebih fokus pada inti pekerjaan mereka, yakni mengajar, melakukan penelitian, pengabdian, dan tugas-tugas lainnya. Diperlukan juga revisi pada sistem penilaian kinerja dosen, terutama terkait kenaikan jabatan fungsional, agar tidak menghambat kreativitas dan inovasi dalam penyampaian ilmu pengetahuan.

Sistem penelitian dan pengabdian masyarakat juga perlu diperbaiki untuk memberikan dukungan lebih besar kepada dosen. Proses seleksi proposal yang transparan dan

penyediaan dana penelitian yang memadai dan layak akan membuka peluang bagi dosen untuk melakukan penelitian yang berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, perlu adanya penguatan undang-undang untuk melindungi dosen dalam menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah. Adanya kebebasan tersebut dinilai penting sehingga dosen lebih mudah memberikan pendidikan politik yang seyogyakannya menjadi pendidikan wajib bagi semua kalangan untuk menciptakan negara demokrasi yang ideal.

Untuk itu, perubahan yang konkrit sangat

diperlukan untuk meningkatkan kondisi kerja dosen di Indonesia. Solusi tidak hanya terletak pada pemberian gaji yang lebih tinggi, melainkan juga pada reformasi pada sistem administrasi, penilaian kinerja, penelitian, dan dukungan masyarakat. Dengan adanya pendekatan yang komprehensif ini, kita dapat memastikan bahwa para dosen memiliki lingkungan kerja yang kondusif untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik, sekaligus menciptakan generasi intelek di tengah ejekan 'si paling intelek'.

